

Research Article



Paradoks Morowali: Ketika Kabupaten Terkaya Indonesia Menghadapi Keterbatasan Kapasitas Fiskal

Muhyiddin¹, Achmanto Mendatu², Muhammad Dio Rhiza Amrizal³, Irkham Syahrul Rozikin⁴

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

^{2,3,4} The Indonesia Think Tank and Policy Lab

Abstrak

Kabupaten Morowali merupakan salah satu contoh paling menonjol dari transformasi ekonomi berbasis hilirisasi nikel di Indonesia. Dalam kurun waktu 2011–2025, industrialisasi yang dipimpin oleh Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan menjadikan Morowali sebagai kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi di Indonesia. Namun, keberhasilan ekonomi tersebut memunculkan paradoks pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah secara proporsional. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara transformasi ekonomi, kapasitas fiskal, dan kapasitas pembangunan daerah dalam konteks industrialisasi berbasis sumber daya alam. Penelitian menggunakan pendekatan *Embedded Fiscal Governance Case Study* yang mengintegrasikan analisis data ekonomi dan fiskal periode 2011–2025 dengan *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam, dan telaah dokumen kebijakan. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu transformasi ekonomi, kapasitas fiskal, dan tata kelola pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Morowali berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini menghasilkan fenomena *Fiscal Effort Collapse* yang ditandai oleh *revenue lag*, *spending lag*, dan *relative state shrinking*. Keterbatasan fiskal tersebut kemudian memunculkan *Development Capacity Gap*, yaitu kesenjangan antara kebutuhan pembangunan yang meningkat akibat industrialisasi dan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhinya. Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual *The Morowali Paradox*, yang menjelaskan hubungan antara *economic boom*, *fiscal effort collapse*, dan *development capacity gap*. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan industrialisasi perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan institusi publik dalam mengelola konsekuensi pembangunannya.

Article History:

Received: 17 Juni 2026

Accepted: 21 Juni 2026

Published: 30 Juni 2026

Keywords: Morowali; hilirisasi nikel; kapasitas fiskal; fiscal effort collapse; development capacity gap; industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Correspondence Email:

udyn@bappenas.go.id

1. Pendahuluan

1.1 Industrialisasi, Hilirisasi, dan Konteks Global

Dalam dua dekade terakhir, industrialisasi kembali menempati posisi sentral dalam agenda kebijakan pembangunan global. Setelah periode dominasi paradigma liberalisasi perdagangan, banyak negara mengadopsi kembali kebijakan industri (industrial policy) sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing nasional, meningkatkan nilai tambah domestik, dan mengamankan posisi dalam rantai nilai global (Rodrik, 2021; IMF, 2024). Dinamika ini semakin menguat seiring meningkatnya persaingan geopolitik, transisi energi global, dan permintaan mineral kritis sebagai komponen utama teknologi rendah karbon dan kendaraan listrik.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Indonesia muncul sebagai salah satu contoh paling menonjol dari penerapan kebijakan industri berbasis sumber daya alam. Melalui kebijakan hilirisasi mineral—khususnya nikel—pemerintah berupaya mengubah posisi Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi. Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan penuh sejak 2020 menjadi tonggak strategis yang mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, menarik investasi asing berskala besar, serta mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai pasok global industri baterai dan kendaraan listrik (Altenburg & Assmann, 2017; Lin, 2012; Morris et al., 2019).

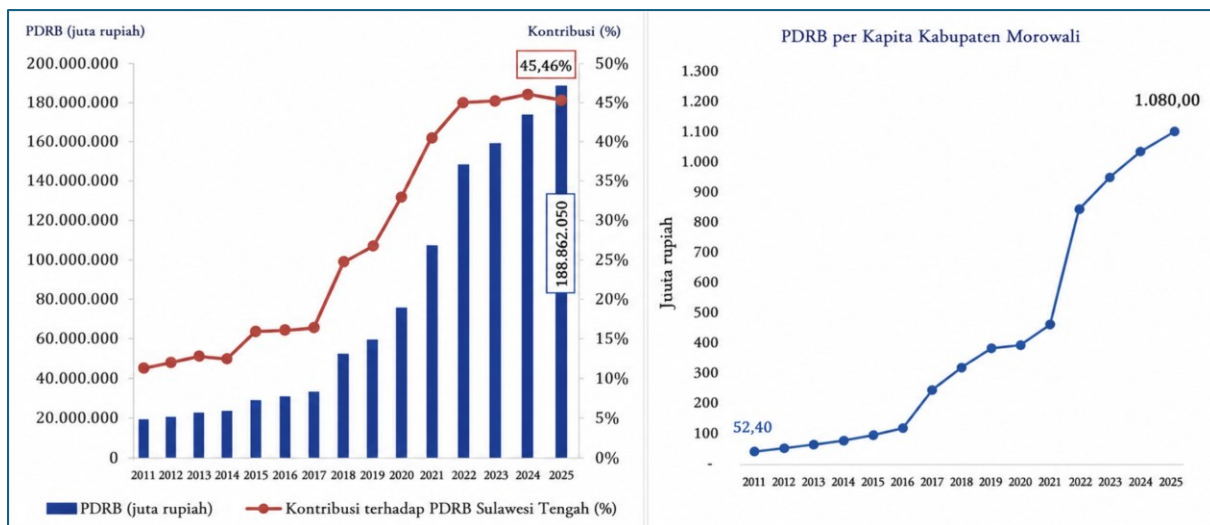
Hasilnya terlihat nyata secara makro. Dalam waktu singkat, Indonesia menjelma menjadi pemain utama dalam industri nikel global, dengan investasi industri pengolahan yang meningkat pesat dan ekspor produk hilir melonjak signifikan. Transformasi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu laboratorium terpenting dalam studi kontemporer mengenai resource-based industrialization.

1.2 Morowali sebagai Pusat Pertumbuhan Baru

Di antara berbagai kawasan yang berkembang akibat kebijakan hilirisasi, Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan contoh paling menonjol. Kehadiran Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengubah Morowali dari wilayah pertambangan dengan aktivitas ekonomi terbatas menjadi salah satu pusat industri terbesar di Indonesia—simpul utama pengolahan nikel nasional yang terhubung langsung dengan rantai pasok dan pasar global.

Transformasi ini dapat dikategorikan sebagai salah satu perubahan ekonomi regional paling spektakuler dalam sejarah pembangunan Indonesia modern. PDRB harga berlaku Kabupaten Morowali meningkat dari sekitar Rp4,25 triliun (2011) menjadi Rp188,86 triliun (2025)—tumbuh lebih dari 44 kali lipat dalam empat belas tahun. Pada periode yang sama, kontribusi Morowali terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah meningkat dari sekitar 7 persen menjadi hampir 46 persen. PDRB per kapita mencapai sekitar Rp1 miliar per penduduk per tahun pada 2024, menjadikan Morowali sebagai kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi di Indonesia.

Gambar 1. Perkembangan PDRB Harga Berlaku, Persentase Kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tengah, dan PDRB Per Kapita, Kabupaten Morowali 2011–2025



Sumber: Diolah Penulis dari berbagai data resmi BPS dan sumber lainnya (Muhyiddin et al., 2026)

Dalam perspektif growth pole theory (Perroux, 1955; Hirschman, 1958) dan New Economic Geography (Krugman, 1991; Fujita et al., 1999), IMIP dapat dipahami sebagai pusat aglomerasi yang mendorong proses pertumbuhan kumulatif melalui efek forward dan backward linkages. Tidak berlebihan apabila Morowali kemudian dipandang sebagai simbol keberhasilan hilirisasi nikel dan industrialisasi berbasis sumber daya alam di Indonesia.

1.3 Paradoks Pembangunan

Namun, keberhasilan ekonomi tersebut justru memunculkan pertanyaan penting yang belum banyak dijawab dalam literatur. Sebagian besar penelitian mengenai hilirisasi nikel di Indonesia berfokus pada peningkatan ekspor, investasi, dan penciptaan lapangan kerja (Altenburg & Assmann, 2017; Morris et al., 2019; Wijaya & Jones, 2025). Sementara itu, literatur mengenai *resource-based development* secara konsisten menunjukkan bahwa wilayah yang mengalami ledakan ekonomi berbasis sumber daya alam sering menghadapi berbagai paradoks pembangunan (Sachs & Warner, 1995, 2001; Venables, 2016; Stiglitz, 2016).

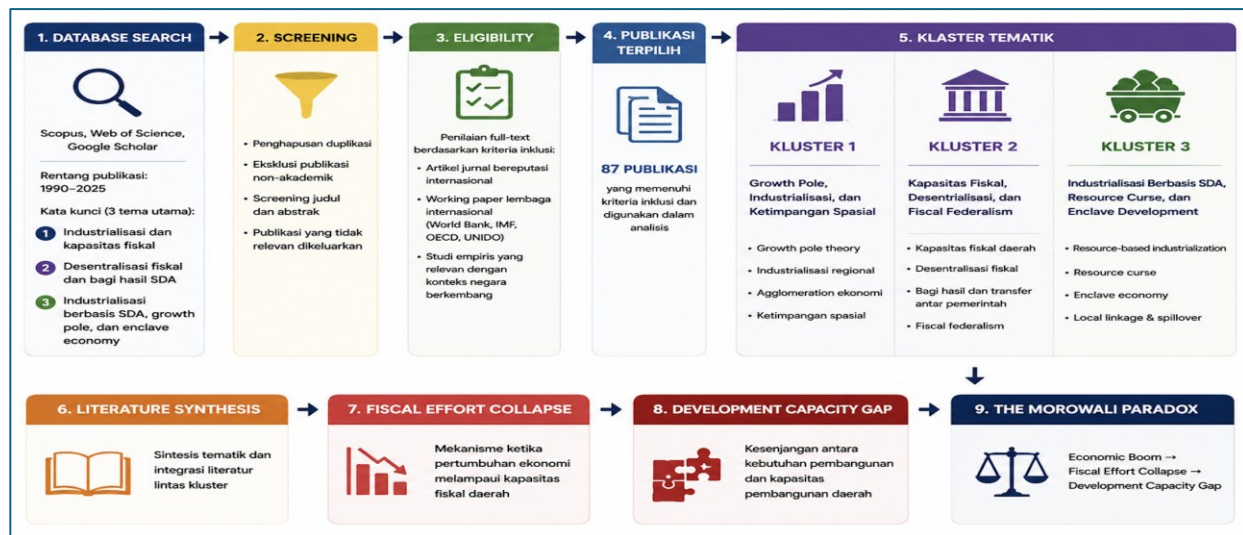
Fenomena yang mulai terlihat di Morowali justru mengonfirmasi kecemasan tersebut. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, kapasitas fiskal daerah tidak berkembang dalam kecepatan yang sama. Pendapatan daerah meningkat secara nominal, tetapi rasio pendapatan daerah terhadap PDRB mengalami penurunan yang sangat signifikan—dari 14,93 persen (2011) menjadi hanya 1,35 persen (2025). Akibatnya, kebutuhan pembangunan yang meningkat akibat industrialisasi dan urbanisasi tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Adriyanto (2016) dan Hannani & Ananda (2024) menemukan pola serupa di daerah kaya sumber daya alam Indonesia, di mana konversi kekayaan alam menjadi kapasitas fiskal tidak berlangsung secara otomatis.

Dari paradoks inilah penelitian ini dibangun. Tiga pertanyaan utama diajukan: (1) Bagaimana pola transformasi ekonomi dan fiskal Kabupaten Morowali selama periode industrialisasi 2011–2025? (2) Melalui mekanisme apa pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat tidak diikuti oleh penguatan kapasitas fiskal yang proporsional? (3) Apa implikasi dari ketidakseimbangan tersebut terhadap kapasitas pembangunan pemerintah daerah? Artikel ini bertujuan menjawab ketiga pertanyaan tersebut sekaligus mengajukan dua konsep baru—Fiscal Effort Collapse dan Development Capacity Gap—sebagai kontribusi teoretis pada literatur pembangunan regional dan fiskal desentralisasi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Protokol *Systematic Literature Review*

Gambar 2. PRISMA Flow Diagram Literature Review



Catatan: diolah penulis dari berbagai sumber (Muhyiddin et al., 2026)

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan dapat direplikasi, artikel ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagaimana direkomendasikan oleh Tranfield et al. (2003) dan Petticrew & Roberts (2006). Pencarian literatur dilakukan melalui Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dengan rentang publikasi 1990–2025. Kata kunci dikelompokkan ke dalam tiga tema utama: (1) industrialisasi dan kapasitas fiskal;



(2) desentralisasi fiskal dan bagi hasil sumber daya alam; serta (3) industrialisasi berbasis sumber daya alam, growth pole, dan enclave economy. Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal bereputasi internasional, working paper lembaga internasional (World Bank, IMF, OECD, UNIDO), dan studi empiris yang relevan dengan konteks negara berkembang.

Dari proses seleksi bertahap mengikuti kerangka PRISMA, diperoleh 87 publikasi yang paling relevan, dipetakan ke dalam tiga kluster: (1) industrialisasi, growth pole, dan ketimpangan spasial; (2) kapasitas fiskal, desentralisasi, dan fiskal federalism; serta (3) industrialisasi berbasis sumber daya alam, resource curse, dan enclave development. Ketiga kluster ini menjadi landasan konseptual untuk memahami paradoks Morowali.

2.2 Kluster I: Industrialisasi, *Growth Pole*, dan Ketimpangan Spasial

Teori growth pole dari Perroux (1955) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu yang memiliki industri propulsif. Pertumbuhan menyebar melalui forward dan backward linkages. Hirschman (1958) memperluas perspektif ini melalui konsep unbalanced growth, namun Myrdal (1957) mengingatkan bahwa pertumbuhan juga dapat menghasilkan backwash effects—penarikan sumber daya dari wilayah sekitar menuju pusat pertumbuhan.

Perspektif ini diformalkan dalam New Economic Geography (NEG) oleh Krugman (1991) dan Fujita et al. (1999): increasing returns to scale, biaya transportasi yang menurun, dan aglomerasi ekonomi menyebabkan konsentrasi aktivitas pada lokasi tertentu. Dalam kerangka ini, IMIP dapat dipahami sebagai pusat aglomerasi yang menarik investasi, tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi dalam skala masif. Literatur empiris menunjukkan bahwa growth pole sering menghasilkan dampak ambigu: aglomerasi meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun konsentrasi aktivitas ekonomi juga menciptakan ketimpangan spasial dan tekanan fiskal (World Bank, 2009; World Bank, 2024).

Dalam konteks negara berkembang, industrialisasi yang sangat terkonsentrasi sering menghasilkan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pelayanan publik yang tertinggal—pola yang terlihat pada kota-kota tambang di Afrika, kawasan minyak di Amerika Latin, dan berbagai kawasan industri berbasis ekstraktif di Asia Tenggara. Morowali menunjukkan karakteristik serupa, khususnya di Kecamatan Bahodopi. Namun, literatur growth pole masih relatif sedikit membahas bagaimana konsentrasi pertumbuhan memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah—kesenjangan yang menjadi salah satu fokus penelitian ini.

2.3 Kluster II: Kapasitas Fiskal, Desentralisasi, dan Fiskal Federalism

Dalam teori klasik pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi seharusnya memperluas basis pajak dan meningkatkan kapasitas fiskal negara (Besley & Persson, 2011). Namun, hubungan tersebut tidak selalu otomatis. Literatur fiskal federalism menunjukkan bahwa distribusi kewenangan fiskal antar tingkat pemerintahan sangat menentukan kemampuan daerah untuk menangkap manfaat ekonomi dari pertumbuhan (Oates, 1972, 1999; Boadway & Shah, 2009; Martinez-Vazquez et al., 2017).

Dalam banyak negara berkembang, pemerintah daerah menghadapi vertical fiscal imbalance—tanggung jawab pengeluaran yang besar dengan kewenangan pendapatan yang terbatas—sehingga pertumbuhan ekonomi tidak otomatis meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara proporsional. Adriyanto (2016) menemukan bahwa daerah kaya sumber daya alam di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengonversi aktivitas ekonomi menjadi kapasitas fiskal yang memadai, sementara Hannani & Ananda (2024) menunjukkan bahwa sumber daya alam berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun efektivitas desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan relatif terbatas. Ulum et al. (2019) menambahkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan risiko korupsi di daerah kaya sumber daya alam akibat besarnya diskresi pemerintah daerah dalam pengelolaan izin dan sumber daya. Dalam konteks Morowali, persoalannya bukan sekadar apakah ekonomi tumbuh, tetapi apakah sistem fiskal lokal mampu menangkap nilai tambah yang dihasilkan oleh industrialisasi.

2.4 Kluster III: *Resource Curse* dan *Enclave Development*

Literatur resource-based development berangkat dari optimisme bahwa sumber daya alam dapat menjadi modal awal industrialisasi melalui hilirisasi (Altenburg & Assmann, 2017). Namun, literatur resource curse konsisten

menunjukkan paradoks: Sachs & Warner (1995; 2001) menemukan bahwa negara kaya sumber daya justru sering tumbuh lebih lambat dibandingkan negara miskin sumber daya. Auty (1993), Mehlum et al. (2006), dan van der Ploeg (2011) mengidentifikasi mekanisme paradoks tersebut melalui rent-seeking, lemahnya institusi, volatilitas komoditas, ketergantungan ekonomi, dan enclave development.

Konsep *enclave economy* sangat relevan bagi Morowali. Menurut Venables (2016) dan Stiglitz (2016), *enclave economy* terjadi ketika aktivitas ekonomi modern memiliki keterkaitan yang lemah dengan ekonomi lokal: produksi berorientasi ekspor, teknologi dan modal berasal dari luar, sementara manfaat ekonomi lokal relatif terbatas. Berbagai studi tentang pertambangan di Afrika, Amerika Latin, dan Asia menunjukkan pola serupa—pertumbuhan ekonomi tinggi dengan *multiplier effect* lokal yang terbatas (Humphreys et al., 2007).

Kasus Morowali memperlihatkan bentuk yang lebih kompleks. Berbeda dengan *enclave* ekstraktif tradisional, IMIP merupakan *processing-based industrial enclave*—hilirisasi dan manufaktur berlangsung di dalam negeri. Namun, sebagian besar rantai nilai, kepemilikan modal, dan mekanisme fiskal masih berada di luar kendali pemerintah daerah. IMF (2024) menunjukkan bahwa banyak kebijakan industrialisasi di Asia berhasil mendorong transformasi produksi, tetapi tidak selalu menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi yang berkelanjutan tanpa reformasi institusional yang memadai.

2.5 Sintesis dan Kesenjangan Penelitian

Hasil tinjauan sistematis menunjukkan bahwa ketiga kluster literatur berkembang secara relatif terpisah: literatur growth pole menjelaskan konsentrasi pertumbuhan ekonomi; literatur fiscal federalism menjelaskan pembentukan kapasitas fiskal; sedangkan literatur *resource curse* dan *enclave economy* menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam tidak selalu menghasilkan pembangunan inklusif. Namun terdapat tiga kesenjangan penting.

Pertama, sangat sedikit studi yang secara eksplisit menghubungkan industrialisasi berbasis sumber daya alam dengan dinamika kapasitas fiskal subnasional. Kedua, sebagian besar penelitian mengevaluasi keberhasilan industrialisasi melalui indikator pertumbuhan ekonomi, investasi, atau ekspor, sementara implikasi fiskalnya relatif terabaikan. Ketiga, hampir tidak ada studi yang secara eksplisit menganalisis kondisi ketika pertumbuhan ekonomi meningkat sangat cepat namun kapasitas fiskal relatif justru menurun. Kasus Morowali—dengan pertumbuhan PDRB lebih dari 40 kali lipat namun rasio pendapatan daerah terhadap PDRB yang turun dari 14,93 persen menjadi 1,35 persen—menyediakan konteks empiris yang unik untuk mengisi ketiga kesenjangan tersebut.

2.6 Kerangka Konseptual: Fiscal Effort Collapse dan Development Capacity Gap

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini mengembangkan konsep *Fiscal Effort Collapse* sebagai kerangka analitis utama. Konsep ini berangkat dari kritik terhadap asumsi umum bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis memperkuat kapasitas fiskal negara (Musgrave, 1959; Besley & Persson, 2011; Oates, 1999). Berbeda dari fiscal stress yang menekankan tekanan fiskal akibat penurunan pendapatan secara absolut (Hendrick, 2004), *Fiscal Effort Collapse* menggambarkan situasi di mana penerimaan dan belanja pemerintah daerah masih meningkat secara nominal, tetapi peningkatannya jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kapasitas fiskal relatif mengalami penurunan.

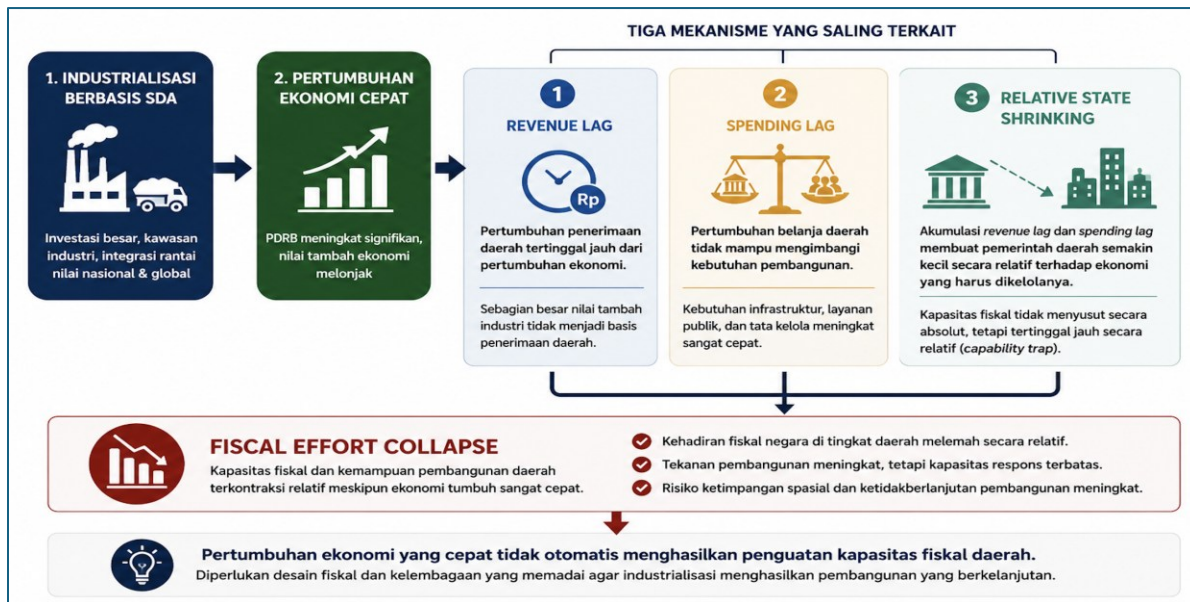
Fiscal Effort Collapse beroperasi melalui tiga mekanisme yang saling terkait. Pertama, revenue lag: pertumbuhan penerimaan daerah tertinggal jauh dibandingkan pertumbuhan output ekonomi karena sebagian besar nilai tambah industri tidak terkonversi menjadi basis penerimaan pemerintah daerah—akibat struktur perpajakan dan rantai nilai yang terintegrasi secara nasional dan global.

Kedua, *spending lag*: pertumbuhan belanja pemerintah daerah tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan pembangunan akibat industrialisasi dan urbanisasi, mencerminkan ketidakseimbangan antara tanggung jawab pembangunan dengan sumber daya fiskal yang tersedia (Bahl & Bird, 2018).



Ketiga, *relative state shrinking*: akumulasi dari revenue lag dan spending lag menghasilkan kondisi di mana pemerintah daerah tidak menyusut secara absolut, tetapi semakin kecil secara relatif terhadap ukuran ekonomi yang harus dikelolanya—sejalan dengan konsep *capability trap* dari Pritchett et al. (2013).

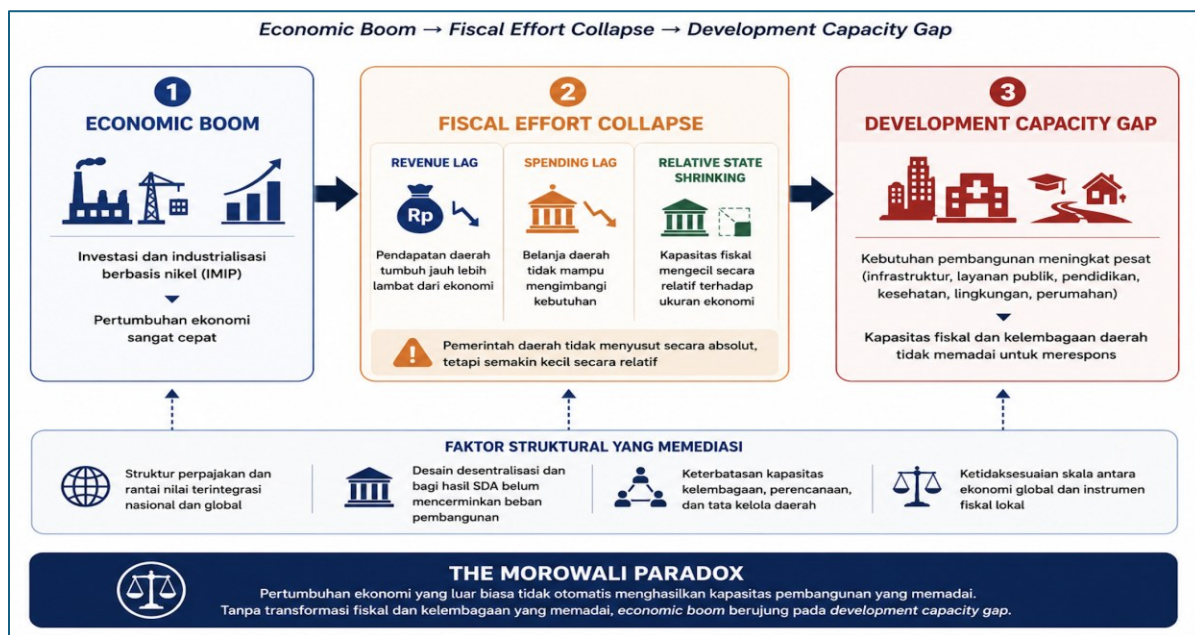
Gambar 3. Mekanisme Fiscal Effort Collapse



Catatan: diolah penulis dari berbagai sumber (Muhyiddin et al., 2026)

Penelitian ini juga mengoperasionalkan kapasitas fiskal melalui dua indikator relatif: (1) Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB ($\text{RevCap} = \text{Pendapatan Daerah} / \text{PDRB}$); dan (2) Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB ($\text{ExpCap} = \text{Belanja Daerah} / \text{PDRB}$). Penurunan kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal tumbuh lebih lambat dibandingkan ukuran ekonomi yang harus dilayani.

Gambar 4. Kerangka Konseptual—The Morowali Paradox



Catatan: diolah penulis dari berbagai sumber (Muhyiddin et al., 2026)

Lebih jauh, penelitian ini mengembangkan konsep *Development Capacity Gap* sebagai implikasi lanjutan dari *Fiscal Effort Collapse*. Konsep ini didefinisikan sebagai kesenjangan antara kebutuhan pembangunan yang meningkat akibat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang sangat cepat dengan kemampuan fiskal, kelembagaan, dan tata kelola pemerintah daerah untuk memenuhinya.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Embedded Fiscal Governance Case Study*, yaitu studi kasus yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memahami hubungan antara transformasi ekonomi, kapasitas fiskal, dan kapasitas pembangunan daerah dalam konteks industrialisasi berbasis sumber daya alam. Pendekatan ini dipilih karena Morowali merupakan *critical case* yang memperlihatkan transformasi ekonomi luar biasa sekaligus menghadirkan paradoks fiskal dan pembangunan yang belum banyak dijelaskan dalam literatur (Yin, 2018; Creswell & Creswell, 2018).

Studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam mekanisme yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal, dan kapasitas pembangunan dalam konteks institusional tertentu. Data kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola transformasi ekonomi dan fiskal, sedangkan data kualitatif digunakan untuk menjelaskan mekanisme kelembagaan dan tata kelola yang mendasari fenomena tersebut.

3.2 Sumber dan Pengumpulan Data

Data kuantitatif mencakup periode 2011–2025 guna menangkap kondisi sebelum dan sesudah berkembangnya industri pengolahan nikel. Sumber data meliputi BPS Kabupaten Morowali, BPS Provinsi Sulawesi Tengah, DJPK Kementerian Keuangan, dan Bappeda Kabupaten Morowali. Data tersebut digunakan untuk membangun indikator transformasi ekonomi dan kapasitas fiskal, termasuk *revenue-to-GRDP ratio* dan *expenditure-to-GRDP ratio* (BPS Kabupaten Morowali, 2011–2025; BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2011–2025).

Data kualitatif diperoleh melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dan wawancara mendalam. FGD dilaksanakan di Morowali dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Morowali, DPRD, Bappeda, BPKAD, manajemen IMIP, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara semi-terstruktur juga dilakukan dengan informan kunci di tingkat nasional dan daerah, termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan, akademisi, praktisi pembangunan daerah, dan pelaku industri. Wawancara difokuskan pada isu kapasitas fiskal, tata kelola pembangunan, urbanisasi, penyediaan layanan publik, dan hubungan antara kawasan industri dengan pemerintah daerah.

3.3 Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, *Economic Transformation Analysis*, mengidentifikasi skala dan karakteristik transformasi ekonomi Morowali melalui analisis perkembangan PDRB, PDRB per kapita, struktur ekonomi, dan kontribusi Morowali terhadap perekonomian Sulawesi Tengah. Tahap kedua, *Fiscal Capacity Analysis*, menganalisis kapasitas fiskal daerah melalui tiga indikator utama: *revenue ratio* (rasio pendapatan daerah terhadap PDRB), *expenditure ratio* (rasio belanja daerah terhadap PDRB), dan *PAD ratio* (rasio pendapatan asli daerah terhadap PDRB). Tahap ketiga, *Thematic Governance Analysis*, menggunakan analisis tematik terhadap hasil FGD, wawancara, dan dokumen kebijakan melalui proses *coding*, kategorisasi, dan identifikasi tema utama guna menjelaskan *Development Capacity Gap*.

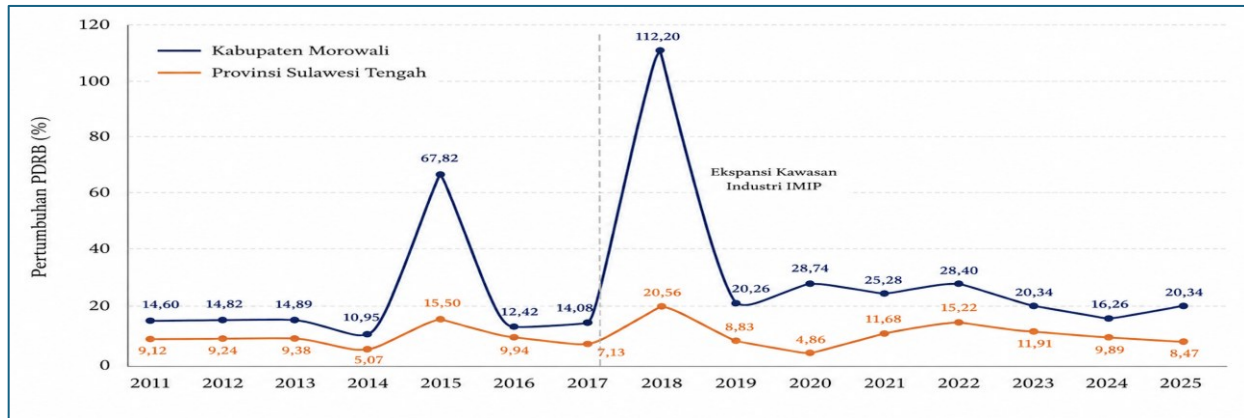
4. Hasil dan Pembahasan

4.1 The Morowali Economic Miracle: Transformasi Tanpa Preseden

Analisis data longitudinal 2011–2025 mengonfirmasi bahwa Morowali mengalami salah satu transformasi ekonomi paling cepat dalam sejarah pembangunan daerah di Indonesia. PDRB harga berlaku meningkat dari Rp4,25 triliun (2011) menjadi Rp188,86 triliun (2025)—setara pertumbuhan 44,4 kali lipat dalam empat belas tahun.



Gambar 5. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah, 2011–2025



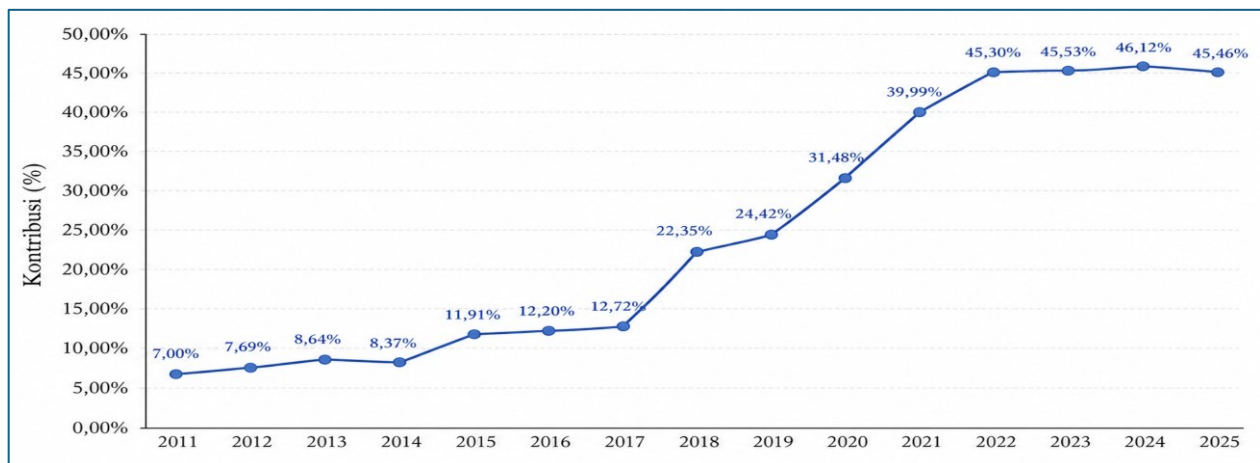
Sumber: Diolah Penulis dari berbagai data resmi BPS dan sumber lainnya (Muhyiddin et al., 2026)

Sebagai perbandingan, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan hanya meningkat sekitar 6,8 kali lipat pada periode yang sama. Kontribusi Morowali terhadap PDRB Sulawesi Tengah meningkat dari sekitar 7 persen menjadi hampir 46 persen—hampir separuh aktivitas ekonomi provinsi kini terkonsentrasi di satu kabupaten.

Dari perspektif growth pole theory, transformasi ini menunjukkan keberhasilan IMIP sebagai pusat pertumbuhan yang menghasilkan efek aglomerasi dalam skala besar.

Investasi industri pengolahan nikel menarik tenaga kerja, infrastruktur, modal, dan aktivitas ekonomi lainnya, sehingga menciptakan proses pertumbuhan kumulatif sebagaimana dijelaskan oleh Perroux (1955) dan Krugman (1991).

Gambar 6. Kontribusi Kabupaten Morowali terhadap PDRB Sulawesi Tengah, 2011–2025



Sumber: Diolah Penulis dari berbagai data resmi BPS dan sumber lainnya (Muhyiddin et al., 2026)

Pertumbuhan ini juga mendorong lonjakan migrasi, ekspansi kawasan permukiman, dan peningkatan permintaan layanan publik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Sulawesi Tengah.

4.2 Fiscal Effort Collapse: Bukti Empiris dan Mekanisme

Meskipun pertumbuhan ekonomi berlangsung sangat cepat, analisis fiskal menunjukkan pola yang kontras. Selama periode yang sama ketika PDRB meningkat 44,4 kali lipat, pendapatan daerah hanya meningkat sekitar 4 kali lipat, sementara belanja daerah meningkat sekitar 5,8 kali lipat. Dengan demikian, ekonomi Morowali tumbuh sekitar

sepuluh kali lebih cepat dibandingkan kapasitas fiskalnya—sebuah bukti awal yang kuat dari fenomena Fiscal Effort Collapse.

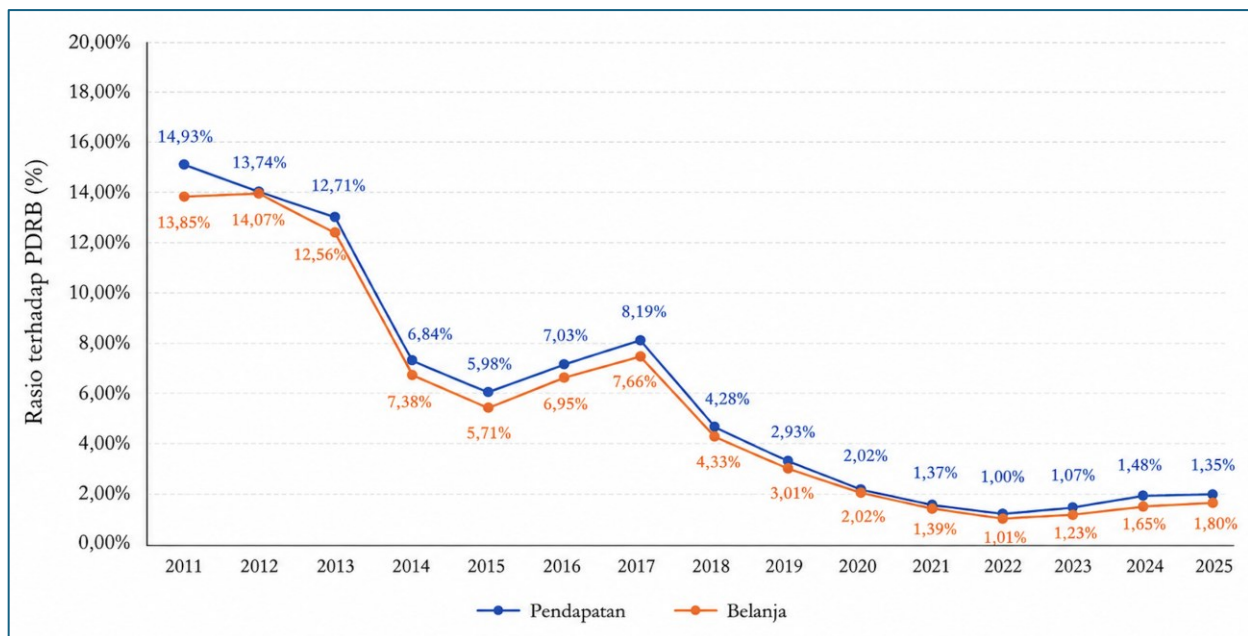
Analisis rasio fiskal mempertegas temuan ini. Rasio pendapatan daerah terhadap PDRB mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 14,93 persen (2011) menjadi hanya 1,35 persen (2025). Pola serupa terjadi pada sisi pengeluaran: rasio belanja daerah terhadap PDRB turun dari 13,85 persen menjadi 1,80 persen. Meskipun pendapatan dan belanja daerah terus meningkat secara nominal, kapasitas fiskal relatif mengalami kontraksi yang sangat tajam. Ini merupakan manifestasi empiris dari Fiscal Effort Collapse: semakin besar skala ekonomi yang terbentuk, semakin kecil peran relatif pemerintah daerah dalam perekonomian tersebut.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa *Fiscal Effort Collapse* berlangsung melalui tiga mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, *revenue lag*: PDRB Morowali meningkat lebih dari 44 kali lipat sementara pendapatan daerah hanya tumbuh empat kali lipat, mengindikasikan bahwa sebagian besar nilai tambah industri tidak terkonversi menjadi penerimaan fiskal daerah. Struktur perpajakan yang ada menyebabkan sebagian besar manfaat ekonomi mengalir ke pemerintah pusat melalui Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, dan instrumen perpajakan nasional lainnya, bukan ke pemerintah kabupaten.

Kedua, *spending lag*: ketidakmampuan pertumbuhan belanja untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan pembangunan akibat industrialisasi dan urbanisasi. Karena kapasitas penerimaan berkembang lebih lambat dari ekonomi, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengeluaran pembangunan menjadi relatif terbatas. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara tanggung jawab pembangunan yang harus dipikul daerah dengan sumber daya fiskal yang tersedia (Bahl & Bird, 2018).

Ketiga, *relative state shrinking*: akumulasi dari kedua mekanisme di atas menghasilkan situasi di mana pemerintah daerah secara absolut masih tumbuh, namun semakin kecil secara relatif terhadap ekonomi yang harus dikelolanya. Kondisi ini sejalan dengan konsep *capability trap* (Pritchett et al., 2013): kemampuan institusi publik berkembang lebih lambat dibandingkan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Gambar 7. Trajektori Rasio Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap PDRB Kabupaten Morowali, 2011–2025



Sumber: Diolah Penulis dari berbagai data resmi BPS dan sumber lainnya (Muhyiddin et al., 2026)

Penting untuk ditegaskan bahwa fenomena ini berbeda dari fiscal stress konvensional (Hendrick, 2004). Pemerintah Kabupaten Morowali tidak mengalami krisis anggaran atau penurunan pendapatan secara absolut. Sebaliknya, yang

terjadi adalah erosi kapasitas fiskal relatif—sebuah bentuk khusus dari melemahnya kapasitas negara yang dipicu bukan oleh kemunduran ekonomi, melainkan justru oleh pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat melampaui kemampuan institusi publik untuk beradaptasi.

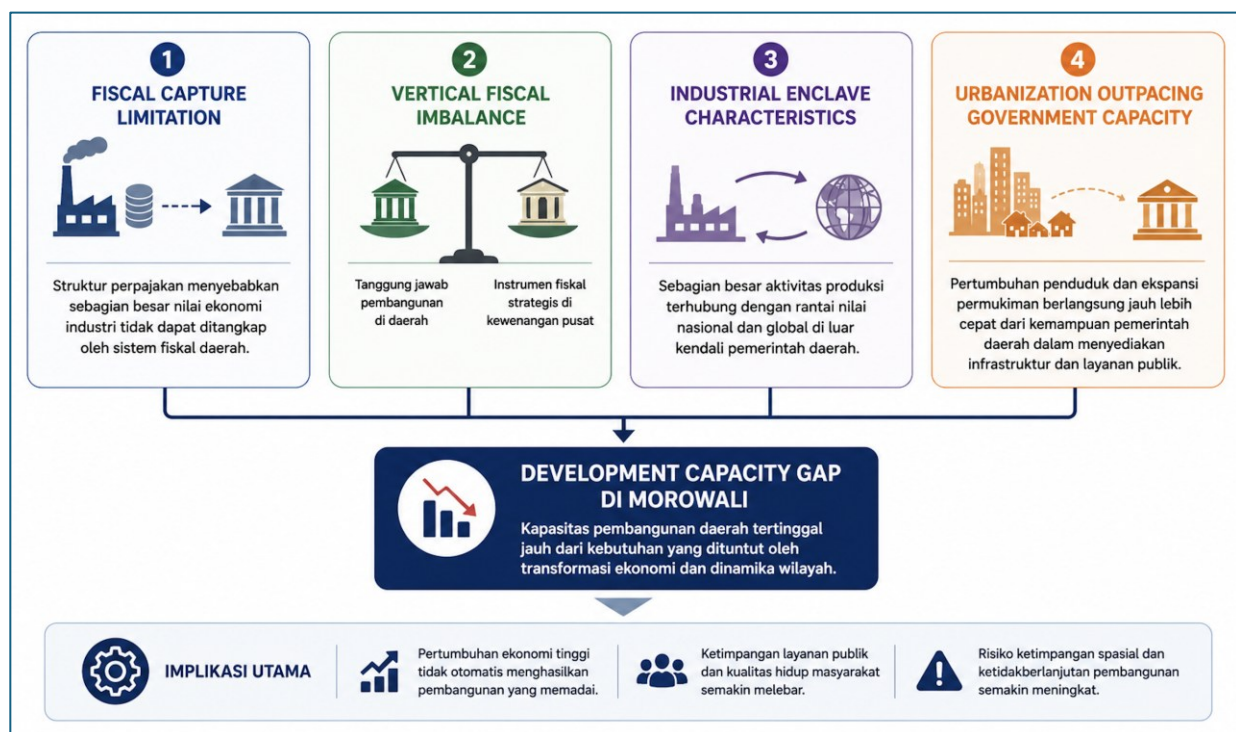
4.3 Development Capacity Gap: Tekanan Pembangunan di Tengah Ledakan Ekonomi

Jika *Fiscal Effort Collapse* menjelaskan dinamika fiskal, hasil FGD dan wawancara menunjukkan bahwa implikasinya jauh melampaui persoalan angka fiskal. Hampir seluruh informan—dari pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, hingga pelaku industri—menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Morowali telah menciptakan tekanan pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seringkali dengan laju yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pemerintah daerah untuk merespons.

Pada sektor infrastruktur dasar, pertumbuhan industri dan lonjakan penduduk menciptakan kebutuhan terhadap jalan, drainase, air bersih, transportasi, dan logistik yang melampaui kapasitas yang tersedia.

Di sektor perumahan, masuknya puluhan ribu pekerja migran memicu permintaan hunian yang masif, menghasilkan kawasan permukiman berkepadatan tinggi, kenaikan harga lahan, dan berkembangnya permukiman informal yang belum didukung infrastruktur perkotaan memadai.

Gambar 8. Determinan Development Capacity Gap di Morowali



Catatan: diolah penulis dari berbagai sumber (Muhyiddin et al., 2026)

Pada sektor pendidikan, tantangan terbesar bukan hanya penyediaan sarana fisik, tetapi kemampuan menghasilkan tenaga kerja lokal yang memenuhi kebutuhan industri. Di sektor kesehatan, kapasitas layanan—rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan—belum berkembang secepat pertumbuhan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, urbanisasi cepat juga menghasilkan tekanan lingkungan yang semakin besar: persampahan, sanitasi, drainase, dan pengelolaan lingkungan perkotaan secara konsisten muncul sebagai isu kritis dalam FGD.

Sintesis antara analisis kuantitatif dan temuan kualitatif menunjukkan bahwa *Development Capacity Gap* di Morowali merupakan hasil interaksi empat faktor struktural. Pertama, *fiscal capture limitation*: struktur perpajakan menyebabkan sebagian besar nilai ekonomi industri tidak dapat ditangkap oleh sistem fiskal daerah. Kedua, *vertical*

fiscal imbalance: tanggung jawab pembangunan berada di daerah, sementara instrumen fiskal strategis berada di kewenangan pusat. Ketiga, *industrial enclave characteristics*: sebagian besar aktivitas produksi terhubung dengan rantai nilai nasional dan global di luar kendali pemerintah daerah. Keempat, *urbanization outpacing government capacity*: pertumbuhan penduduk dan ekspansi permukiman berlangsung jauh lebih cepat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik.

4.4 The Morowali Paradox dalam Perspektif Komparatif

Menempatkan Morowali dalam perspektif komparatif memberikan pemahaman yang lebih luas. Secara umum, terdapat dua pola ekstrem dalam pengalaman industrialisasi negara berkembang. Pertama, model *developmental state* di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, Taiwan): negara berhasil mendorong industrialisasi sekaligus menangkap surplus ekonomi dan menginvestasikannya kembali untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan kapasitas institusional (Johnson, 1982; Wade, 1990; Evans, 1995). Kedua, model *enclave economy* yang banyak ditemukan di kawasan pertambangan Afrika dan Amerika Latin: aktivitas ekonomi menghasilkan nilai tambah besar namun dengan keterkaitan terbatas dengan ekonomi dan kapasitas fiskal lokal (Humphreys et al., 2007; Venables, 2016).

Morowali tidak sepenuhnya sesuai dengan kedua model tersebut. Berbeda dari *enclave ekstraktif tradisional*, nilai tambah nikel di Morowali diproses di dalam negeri melalui fasilitas peleburan terintegrasi—hilirisasi telah berhasil meningkatkan nilai tambah domestik dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Namun dari perspektif fiskal subnasional, Morowali menunjukkan karakteristik yang lebih dekat dengan *enclave economy*: manfaat fiskal tidak terkonsolidasi secara proporsional di tingkat pemerintah daerah yang menanggung sebagian besar konsekuensi pembangunan.

Atas dasar ini, penelitian mengusulkan konsep *processing-based fiscal enclave*: kawasan industri yang berhasil menghasilkan nilai tambah domestik dalam skala besar, namun manfaat fiskalnya tidak terdistribusi secara proporsional kepada pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas konsekuensi pembangunannya. Konsep ini penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi dari perspektif nasional tidak otomatis menjamin penguatan kapasitas pembangunan lokal.

Penelitian ini juga mengidentifikasi empat bentuk *mismatch* yang menjelaskan *Development Capacity Gap*: (1) *scale mismatch*—aktivitas IMIP beroperasi dalam rantai nilai global dengan nilai jauh melampaui skala fiskal pemerintah kabupaten; (2) *fiscal capture mismatch*—sebagian besar penerimaan korporasi dikumpulkan melalui instrumen perpajakan nasional; (3) *coordination mismatch*—pemerintah daerah bertanggung jawab atas dampak sosial-ekonomi industrialisasi namun sumber daya fiskalnya tidak berkembang sepadan; dan (4) *capacity mismatch*—urbanisasi berlangsung jauh lebih cepat dari perkembangan kapasitas administratif dan kelembagaan pemerintah daerah.

4.5 Implikasi bagi Literatur dan Teori

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara industrialisasi, kapasitas fiskal, dan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dari asumsi yang mendominasi literatur. Sebagian besar teori industrialisasi berangkat dari premis bahwa pertumbuhan ekonomi cepat akan memperluas basis fiskal dan pada akhirnya meningkatkan kemampuan negara menyediakan layanan publik (Besley & Persson, 2011; Lin, 2012). Kasus Morowali menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat kondisional.

Lebih jauh, temuan ini mendukung argumen Pritchett et al. (2013) bahwa kapasitas negara harus dipahami secara relasional dan kontekstual. Dalam konteks industrialisasi cepat, ukuran yang relevan bukan seberapa besar anggaran pemerintah secara absolut, melainkan seberapa besar kapasitas pemerintah relatif terhadap skala perubahan ekonomi dan sosial yang harus dikelola. Dari perspektif ini, *Fiscal Effort Collapse* merupakan bentuk khusus dari erosi kapasitas negara yang terjadi bukan karena kemunduran ekonomi, melainkan justru karena pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat.

Kontribusi konseptual ini menjembatani tiga kelompok literatur yang selama ini berkembang terpisah: *growth pole theory* yang menjelaskan konsentrasi pertumbuhan; *fiscal federalism* yang menjelaskan pembentukan kapasitas fiskal; dan *resource curse/enclave economy* yang menjelaskan paradoks pembangunan berbasis sumber daya alam.

4.6 Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi Indonesia dan negara berkembang yang mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam. Empat arah kebijakan dapat direkomendasikan.

Pertama, rekalisasi hubungan fiskal pusat-daerah untuk kawasan industri strategis: formula transfer fiskal perlu mempertimbangkan secara lebih eksplisit tekanan pembangunan yang ditanggung daerah akibat aktivitas industri berskala besar.

Kedua, pengembangan instrumen fiskal khusus untuk kawasan industri strategis, termasuk mekanisme berbagi manfaat (*benefit-sharing mechanism*) yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kawasan industri.

Tabel 1. Sintesis Implikasi Kebijakan

Diagnosis	Mekanisme	Implikasi Kebijakan
Scale Mismatch	Skala ekonomi jauh melebihi kapasitas fiskal lokal	Formula fiskal yang mempertimbangkan kawasan industri strategis
Fiscal Capture Mismatch	Manfaat ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di pusat	Mekanisme berbagi manfaat fiskal yang lebih proporsional
Coordination Mismatch	Tanggung jawab pembangunan tidak sebanding dengan sumber daya	Penguatan koordinasi fiskal multi-level
Capacity Mismatch	Kapasitas pemerintah tertinggal dari laju transformasi ekonomi	Investasi pada kapasitas institusional dan tata kelola pembangunan

Sumber: Diolah Penulis (Muhyiddin et al., 2026)

Ketiga, penguatan kapasitas pembangunan daerah—tidak hanya melalui peningkatan anggaran, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas perencanaan, pengelolaan infrastruktur, tata kelola perkotaan, dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan.

Keempat, integrasi perencanaan kapasitas pembangunan sejak awal dalam setiap pengembangan kawasan industri baru, sehingga pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah dapat berlangsung lebih seimbang.

5. Kesimpulan

5.1 Sintesis Temuan

Artikel ini berangkat dari paradoks pembangunan yang muncul di Kabupaten Morowali: pertumbuhan ekonomi yang luar biasa tidak secara otomatis menghasilkan penguatan kapasitas fiskal dan kapasitas pembangunan daerah. Tiga temuan utama dapat disimpulkan.

Pertama, Morowali mengalami transformasi ekonomi yang sangat cepat—pertumbuhan PDRB lebih dari 44 kali lipat selama 2011–2025—menjadikannya pusat pertumbuhan baru yang mendominasi perekonomian Sulawesi Tengah.

Kedua, pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti peningkatan kapasitas fiskal yang proporsional. Rasio pendapatan dan belanja daerah terhadap PDRB mengalami penurunan tajam, membuktikan terjadinya *Fiscal Effort Collapse* melalui mekanisme *revenue lag*, *spending lag*, dan *relative state shrinking*.

Ketiga, keterbatasan kapasitas fiskal tersebut berimplikasi langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang meningkat, menghasilkan *Development Capacity Gap* yang semakin melebar.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah bersifat kondisional. Pertumbuhan yang tinggi tidak menghasilkan kapasitas pembangunan yang setara apabila sistem fiskal dan kelembagaan tidak berkembang dalam kecepatan yang sama.

5.2 Kontribusi Teoretis

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi teoretis utama. Pertama, konsep *Fiscal Effort Collapse*: mekanisme yang menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi sangat cepat dapat berlangsung bersamaan dengan melemahnya kapasitas fiskal relatif pemerintah daerah. Kedua, konsep *Development Capacity Gap*: perluasan dari literatur *growth pole*, *fiscal federalism*, dan *state capacity* yang menjelaskan bagaimana kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas pemerintah dapat muncul di tengah keberhasilan industrialisasi. Ketiga, konsep *processing-based fiscal enclave*: kategori analitis baru yang mendeskripsikan kawasan industri yang berhasil menciptakan nilai tambah domestik dalam skala besar, namun manfaat fiskalnya tidak terdistribusi secara proporsional di tingkat subnasional.

5.3 Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Desain studi kasus tunggal membatasi generalisasi statistik; penelitian belum mengurai secara rinci seluruh mekanisme transmisi fiskal yang menghubungkan aktivitas industri dengan penerimaan pemerintah daerah; serta data yang tersedia untuk beberapa periode belum sepenuhnya lengkap.

Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan studi komparatif pada kawasan industri lain di Indonesia maupun negara berkembang yang mengalami industrialisasi berbasis mineral kritis—seperti kawasan industri nikel di Halmahera, tembaga di Papua, atau kawasan industri berbasis mineral di Filipina, Kongo, dan Zambia. Selain itu, diperlukan pengembangan indikator kuantitatif yang lebih komprehensif untuk mengukur *Development Capacity Gap* pada tingkat subnasional.

5.4 Penutup

Morowali menunjukkan bahwa industrialisasi tidak hanya memerlukan investasi, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga arsitektur fiskal dan kelembagaan yang mampu mengonversi pertumbuhan tersebut menjadi kapasitas pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa transformasi fiskal yang sepadan, *economic boom* berisiko menghasilkan *Development Capacity Gap* yang semakin melebar.

Dalam konteks transisi energi global dan berkembangnya industri mineral kritis, pelajaran dari Morowali menjadi relevan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi berbagai negara di *Global South* yang menempuh jalur industrialisasi serupa. Pesan utama artikel ini sederhana namun mendasar: pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan syarat penting pembangunan, tetapi tanpa kapasitas fiskal dan kelembagaan yang memadai, pertumbuhan tersebut tidak otomatis berubah menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adriyanto, A. (2016). *Three essays on the economics of fiscal transfers for resource-rich districts in Indonesia* (Doctoral dissertation, The Australian National University). ANU Open Research Repository.
- Altenburg, T., & Assmann, C. (Eds.). (2017). *Green industrial policy: Concept, policies, country experiences*. UN Environment/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik.
- Auty, R. M. (1993). *Sustaining development in mineral economies: The resource curse thesis*. Routledge.
- Bahl, R., & Bird, R. M. (2018). *Fiscal decentralization and local finance in developing countries: Development from below?* *Public Finance Review*, 46(2), 261–295. <https://doi.org/10.1177/1091142115615983>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali. (2011–2025). *Kabupaten Morowali dalam angka*. BPS Kabupaten Morowali.



- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. (2011–2025). *Provinsi Sulawesi Tengah dalam angka*. BPS Provinsi Sulawesi Tengah.
- Besley, T., & Persson, T. (2011). *Pillars of prosperity: The political economics of development clusters*. Princeton University Press.
- Boadway, R., & Shah, A. (2009). *Fiscal federalism: Principles and practice of multiorder governance*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Evans, P. B. (1995). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press.
- Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. J. (1999). *The spatial economy: Cities, regions, and international trade*. MIT Press.
- Hannani, A.M., & Ananda, C.F. (2024). *The Contribution of Fiscal Decentralization and Natural Resources on Economic Growth in Indonesia: Does Corruption Hamper? Journal of Accounting Research, Organization and Economics*. DOI:10.24815/jaroe.v7i2.35769
- Hendrick, R. (2004). *Assessing and measuring the fiscal health of local governments: Focus on Chicago suburban municipalities*. *Urban Affairs Review*, 40(1), 78–114. <https://doi.org/10.1177/1078087404268076>
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.
- Humphreys, M., Sachs, J. D., & Stiglitz, J. E. (Eds.). (2007). *Escaping the resource curse*. Columbia University Press.
- International Monetary Fund (IMF). (2024). *World Economic Outlook: Steady but Slow—Resilience amid Divergence*. IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024>
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese miracle: The growth of industrial policy, 1925–1975*. Stanford University Press.
- Krugman, P. (1991). *Increasing returns and economic geography*. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499. <https://doi.org/10.1086/261763>
- Lin, J. Y. (2012). *New structural economics: A framework for rethinking development and policy*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8955-3>
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). *The impact of fiscal decentralization: A survey*. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095–1129. <https://doi.org/10.1111/joes.12182>
- Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006). *Institutions and the resource curse*. *Economic Journal*, 116(508), 1–20. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01045.x>
- Morris, M., Kaplinsky, R., & Kaplan, D. (2019). *One thing leads to another: Commodities, linkages and industrial development*. *Resources Policy*, 61, 329–337. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.09.008>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Myrdal, G. (1957). *Economic theory and under-developed regions*. Duckworth.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (1999). *An essay on fiscal federalism*. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Perroux, F. (1955). *Note sur la notion de «pôle de croissance*. *Économie Appliquée*, 8(1–2), 307–320.

- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Blackwell Publishing.
- Pritchett, L., Woolcock, M., & Andrews, M. (2013). *Looking like a state: Techniques of persistent failure in state capability for implementation*. *Journal of Development Studies*, 49(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/00220388.2012.709614>
- Rodrik, D. (2021). *On industrial policy*. *Oxford Review of Economic Policy*, 37(3), 444–459. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grab011>
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). *Natural resource abundance and economic growth*. NBER Working Paper No. 5398. National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w5398>
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). *The curse of natural resources*. *European Economic Review*, 45(4–6), 827–838. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00125-8](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00125-8)
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). *Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review*. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Ulum, A. S., Rohman, A., Harto, P., Ratmono, D., & Ghozali, I. (2019). *The role of natural resources on moderating the relationship between fiscal decentralization and corruption: Evidence from Indonesia*. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(1), 67–75. <https://doi.org/10.32479/ijeep.7285>
- van der Ploeg, F. (2011). *Natural resources: Curse or blessing?* *Journal of Economic Literature*, 49(2), 366–420. <https://doi.org/10.1257/jel.49.2.366>
- Venables, A. J. (2016). *Using natural resources for development: Why has it proven so difficult?* *Journal of Economic Perspectives*, 30(1), 161–184. <https://doi.org/10.1257/jep.30.1.161>
- Wade, R. (1990). *Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization*. Princeton University Press.
- Wijaya, T., & Jones, L. (2025). *Indonesia, nickel, and the political economy of polyalignment in the Second Cold War*. *Third World Quarterly*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/01436597.2025.2465514>
- World Bank. (2009). *World Development Report 2009: Reshaping economic geography*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7607-2>
- World Bank. (2024). *World Development Report 2024: The middle-income trap*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2078-6>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. SAGE Publications.